

**RISET KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA**

**ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA  
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh :

**TAUFIQ BEKTI NURALIF**  
**NIM : 2013310156**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**  
**SURABAYA**  
**2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

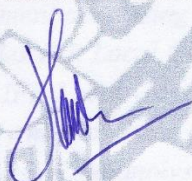
Nama : Taufiq Bekti Nuralif  
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 6 Agustus 1994  
N.I.M : 2013310156  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Penyajian Informasi Keuangan pada *Website*  
Pemerintah Daerah di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

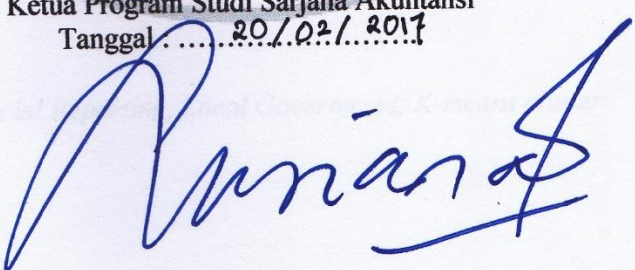
Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 14/02/2017

Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 13/02/2017

  
(Pepie Diptyana, S.E., Ak., M.Si.)

  
(Nur'aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal : 20/02/2017

  
(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., OIA., CPSAK)



**ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA  
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

Taufiq Bekti Nuralif  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : 2013310156@students.perbanas.ac.id

Pepie Diptyana  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : pepie@perbanas.ac.id  
Jl. Nginden Semolo No.34-36 Jangkungan, Surabaya

**ABSTRACT**

*This study aim to analyze the presentation of Local Governments financial information based on the content, timeliness, technology used and the web user support. The sample in this study are used by local governments in Java and Sumatera. Observation was conducted in November 2016 until December 2016. There are 207 of the total 269 local governments in accordance with the selection criteria and the sample can be analyzed further. Data were collected through direct observation on a local government website using the method to calculate the index IFR checklist of Local Government, and analyze the results descriptively. K-means cluster Analyzed used to classify local government possessing similar presentation of financial information. The results showed that the index IFR Local Government still needs to be improved. Based on the data obtained, the index IFR Local Government, has reached 33%. The most frequently expressed Index is timeliness while an index of content relating to the financial statements are still reaches 21%. the results of the analysis of K-means shows there are 4 groups of clusters of 207 districts / cities in Java and Sumatra formed four groups (clusters). Group 1 consisted of 13 districts / cities, group 2 consisted of 120 districts / cities, group 3 consisted 43 districts / cities, and group 4 consists of 31 districts / cities*

*Keywords: Internet Financial Reporting, Local Government, K-means cluster*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan baik pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan masyarakat lainnya. Untuk itu pemerintah harus terus berinovasi agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan pelaporan keuangan, pemerintah pusat sudah memberikan mandat kepada pemerintah daerah yang ditandai dengan turunnya Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membangun *website* guna meningkatkan transparansi publik. Selain instruksi Presiden pemerintah pusat juga menurunkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang dapat dirujuk pada *website* resmi Komisi Informasi Republik Indonesia ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)). Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap badan publik untuk mengungkapkan informasi publik secara berkala. Publikasi hasil pengelolaan keuangan daerah secara khusus diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006, laporan keuangan daerah yang telah diaudit wajib dipublikasikan (pasal 302).

Laporan keuangan yang dikeluarkan tiap tahunnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah selama satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menjalankan mandat yang telah diberikan rakyat dan menjalankan sesuai dengan semestinya. Dengan laporan keuangan yang diterbitkan, diharapkan masyarakat bisa ikut serta mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan daerah dan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis.

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan

melalui *website* daerah. *Website* dipilih karena memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah kemudahan akses data oleh masyarakat dengan biaya yang murah. Hal ini akan menjadi daya tarik utama mengapa pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah harus dipublikasikan melalui *website* daerah, dengan kemudahan mengakses data dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat, IFR diyakini dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penerapapan IFR juga diyakini akan memberikan dampak yang positif, antara lain: kemudahan mengakses informasi publik, masyarakat memperoleh manfaat perbaikan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya praktek penyimpangan dan korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga IFR merupakan suatu hal yang harus segera diimplementasikan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dalam instruksi ini, kepala daerah dianjurkan menyiapkan menu konten TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah) pada masing-masing *website* daerahnya. Konten transparansi ini memuat data terbaru mengenai ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (Ranperda APBD) dan perubahannya, Peraturan Daerah tentang Anggaran dan

pendapatan Belanja Daerah (Perda APBD) dan perubahannya, ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA-SKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD), serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disertai opini atas LKPD. Instruksi ini mulai berlaku bulan Mei 2012 dan paling lambat penerapannya pada tanggal 31 Juli 2012.

Ahmad Rofik (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih rendahnya implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang baru mencapai 48,27% untuk tingkat Nasional. Khusus untuk pemerintah daerah tingkat kepatuhan baru mencapai 42,61%. Atau hanya 170 dari 399 kabupaten yang sudah melaporkan.

Dwi Martani dan Debby Fitriyani (2014) dalam penelitiannya menyatakan tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah baru mencapai 15%. Informasi yang paling sering diungkapkan terkait dengan informasi keuangan dan kinerja Pemerintah daerah masih dalam bentuk berita. Sedangkan untuk pengungkapan informasi keuangan utama dan informasi kinerja yang dalam bentuk anggaran/APBD, laporan keuangan, dan laporan kinerja masih di bawah 10%. Sedangkan pada penelitian menyatakan bahwa informasi yang paling banyak disajikan di *website* pemerintah daerah masih tentang profil daerah, kependudukan, perundangan, dan *timeliness* sedangkan informasi yang terkait dengan keuangan, pembangunan, pelayanan daerah, tokoh

daerah, pariwisata, dan detail kontak Pemasih belum menjadiprioritas utama Pemda (Rora Puspita dan Dwi Martani, 2012). Padahal konten yang terkait dengan transparansi keuangan merupakan konten yang penting untuk disajikan. Konten ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan industri. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, melihat terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya komitmen menjalankan amanat undang-undang No. 14 Tahun 2008 untuk mengelola dan menyediakan informasi yang berkualitas guna tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan di sektor swasta. Penelitian yang dilakukan Laswad et al. (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan di sektor publik belum banyak diteliti. Pernyataan senada juga diungkapkan Styles dan Tennyson (2007) bahwa hanya ada sedikit penelitian tentang institusi pemerintahan. Hasil dua penelitian menunjukkan bahwa size, pendapatan per-kapita, debt, dan financial condition memiliki hubungan positif dengan pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah serta pentingnya untuk segera menerapkan IFR pada *website* Pemda. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil yang diperoleh Verawaty (2012). Verawaty (2012) meneliti pemerintah daerah di Indonesia baik tingkat provinsi, kotamadya kabupaten . Hasil menunjukkan hanya

beberapa masyarakat yang mampu mengakses data yang disediakan dalam e-government, tetapi angka tersebut tidak signifikan. Mayoritas masyarakat belum menekankan pentingnya akuntabilitas serta tidak adanya perluasan terkait dengan lingkup sistem pelaporan dan teknologi yang digunakan. Ketidaktertarikan masyarakat akan menjadi kekurangan dalam perkembangan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sampel Pemda yang terletak di pulau Sumatera dan Jawa. Pulau Sumatera dan Jawa dipilih karena memiliki jumlah penduduk yang besar jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Data yang diambil dari *website* Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pulau Sumatera memiliki 154 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 50.630.931 jiwa sedangkan pulau Jawa memiliki 112 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 136.610.590. Selain itu pula Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi di Indonesia dengan tingkat kepadatan sebesar 1055/km<sup>2</sup> (Nopember, 2016). Carvalho et al. (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa, Pemda-pemda yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan dan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih tinggi. Pemda dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga memiliki jumlah media massa yang lebih banyak dengan tingkat tekanan pers yang semakin besar sehingga akan meningkatkan pengungkapan informasi akuntansi untuk memenuhi permintaan informasi dari pers. Pernyataan ini didukung oleh Lazwad et al. (2005), dalam penelitiannya menunjukkan fakta bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Botti et al. (2014) dalam penelitiannya terkait dengan efisiensi corporate governance dan IFR menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan dapat dengan cara melakukan peningkatan kualitas IFR. Botti et al. (2014) mengukur kualitas IFR menggunakan dua proksi indeks IFR yaitu: IFR *Content* dan IFR *Presentation*. IFR *Content* merupakan informasi yang utama dan umum untuk disajikan kepada pemangku kepentingan sedangkan IFR *Presentation* merupakan format penyajian IFR yang pada dasarnya berfungsi untuk mendukung penyajian IFR *Content*, IFR *Presentation* diukur menggunakan eksistensi teknologi, kenyamanan pengguna (*convenience*) dan *timeliness*. Pada penelitian yang akan dilakukan, pengukuran konten IFR juga berdasarkan penyajian konten yang mengacu pada informasi yang utama dan umum dalam hal ini mengacu pada instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain konten, penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan IFR *Presentation* yang diukur dengan teknologi yang digunakan, *timeliness*, dan *web user support* yang pada dasarnya sama dengan *convenience* atau kenyamanan bagi pengguna.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laswad et al. (2005), Styles dan Tennyson (2007), serta Verawaty (2012) yang masih menunjukkan belum tercapainya konsistensi terkait dengan penelitian IFR pada Pemda, dan kesenjangan harapan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang bersih. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang masih berada dibawah 50% secara nasional. Rendahnya tingkat kepatuhan Pemda dan juga masih adanya gap penelitian tentang IFR pada Pemda membuat penelitian ini

penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan pemerintah daerah berdasarkan *content, timeliness, technology used* dan *web user support*.

Berdasarkan review diatas penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut masih menarik untuk dijadikan topik penelitian lebih lanjut, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Penyajian Informasi Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia”

## **RERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS**

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Deegan, 2002).

Teori legitimasi dalam kaitannya dengan pemerintahan berfokus pada interaksi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Jika kesesuaian dengan norma sosial itu tercapai maka dapat membuat Pemerintah daerah semakin legitimate yang artinya masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghazali dan Chariri (2007), legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara

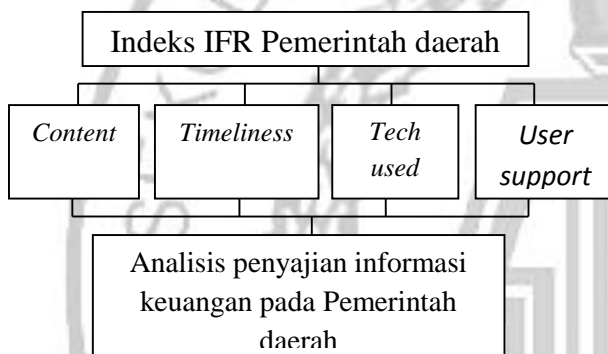
Pemerintah daerah dengan masyarakat dimana Pemerintah daerah beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi dalam Ghazali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu: “semua institusi sosial tidak terkecuali Pemerintah daerah beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Deegan, Robin dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi Pemerintah daerah akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari Pemerintah daerah, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian Pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Teori legitimasi menjadi landasan bagi Pemerintah daerah untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai Pemerintah daerah nya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat Pemerintah daerah tersebut melangsungkan kegiatannya. Pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah salah satunya dengan menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas semua kegiatan pembangunana oleh Pemerintah daerah . Hal ini dapat terjadi apa bila pemerintah daerah mampu menerapkan konsep transparansi kepada masyarakat dengan memberikan akses penuh pada informasi keuangan .

Dowling dan Pfeffer (1975), ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut Pemerintah daerah dengan nilai-nilai masyarakat, maka Pemerintah daerah akan berada pada posisi terancam. Perbedaan ini dinamakan Legitimacy Gap dan dapat mempengaruhi kemampuan

Pemerintah daerah untuk melanjutkan kegiatan kepermerinthannya. Pemerintah daerah harus memantau dan mengevaluasi ketika menemukan kemungkinan munculnya gap tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan IFR masing-masing *website* pemda berdasarkan *content*, *timeliness*, *technology used* dan *web user support*. Penelitian ini akan memberikan data terkait dengan penerapan voluntary *disclosure* yang sudah diterapkan oleh masing-masing Pemda pada *website* daerahnya. Berikut akan menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan:



Sumber: Data diolah

Gambar 1  
KERANGKA PEMIKIRAN

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif dilakukan hanya untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013:7).

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu

permasalahan yang luas dan kompleks. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat.

### Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah di pulau Sumatera dan Jawa yang telah mempunyai *website* dan *website* tersebut dapat diakses selama periode pengamatan. Sampel yang digunakan adalah seluruh pemerintah daerah di pulau Sumatera dan Jawa dan telah memenuhi kriteria pemilihan sampel

### Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu IFR dengan tujuan akan menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat melalui *website* daerah. Untuk menggambarkan bagaimana penerapan IFR oleh pemda peneliti menggunakan indeks-indeks sebagai tolak ukur kualitas informasi keuangan. Indeks-indeks tersebut diantaranya adalah : *content*, *timeliness*, *technology used*, *user support*

### Definisi Operasional

**Content**, *Content* merupakan informasi yang utama dan umum untuk di sajikan kepada pemangku kepentingan, mengacu pada Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konten terdiri dari ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, Laporan Realisasi



Anggaran seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, LKPD yang sudah Audit Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Selain menggunakan konten informasi tahun terakhir, penelitian ini juga menggunakan informasi konten informasi tahun sebelumnya, Jumlah Informasi Lampau yang Disajikan (hanya dlm bentuk HTML), serta grafik informasi keuangan. maksimum score untuk indeks konten adalah 46 poin.

**Timeliness, Timeliness** merupakan ketepatan waktu pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat pengguna internet. Penelitian ini menggunakan berita sebagai alat ukur dalam indeks timeliness karena berita dapat diupdate setiap saat tanpa harus ada kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Dalam penelitian ini indeks *timeliness* Pemerintah daerah diukur dengan : eksistensi berita, update berita, lamanya update berita, RKA tahun berjalan, DPA tahun berjalan, informasi serapan anggaran tahun berjalan. Skor maksimum untuk indeks *timeliness* adalah 9 poin

**Technology used, Technology used** merupakan teknologi penunjang yang disajikan di dalam *website* resmi Pemerintah daerah. Teknologi berfungsi untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang terdapat dalam *website* resmi pemerintah daerah. Dalam menentukan seberapa maju teknologi yang diterapkan masing masing pemerintah daerah penelitian ini menggunakan indikator-indikator yaitu: *Download plugin on spot, Online feedback, Slide presentation, Multimedia, XBRL (advance features), dan Analysis tools*. Skor maksimum untuk indeks *Technology used* adalah 6 poin.

**Web user support, Web user support** merupakan komponen penting yang sebaiknya ada dalam *website* resmi pemerintah daerah. Dengan tersedianya *Web user support*, dapat membantu pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Dalam

penelitian ini *Web user support* diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut : *Site search*, Jumlah klik untuk mengakses Informasi Keuangan (LKPD), Konsistensi desain *web*, *Site map / Peta Situs, Link to top, Link to homepage, Help and FAQ*. Skor maksimum untuk indeks *web user support* adalah 10.

### **Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 80). Jadi populasi merupakan keseluruhan unsur atau elemen yang menjadi subjek atau obyek penelitian, termasuk juga seluruh sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah daerah yang ada yang terletak pada Sumatera dan Jawa.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel maka kesimpulan juga akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. (Sugiyono, 2014:18). Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara non probabilitas dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan pertimbangan (*judgement sampling*) berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan informasi yang dimaksud peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel antara lain: Pemerintah daerah di pulau Sumatera dan Jawa yang memiliki situs resmi yang terdaftar di Kemendagri, Pemerintah daerah di pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar sebagai auditee BPK, Pemerintah daerah di pulau Sumatera dan Jawa yang

mendapatkan opini WTP, WTP-DPP dan WDP dari BPK.

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunder merupakan data yang tidak dapat diperoleh secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa penyajian dan penerapan konten, *timeliness*, teknologi yang digunakan, dan *user support* yang dapat diperoleh dari *website* resmi masing-masing pemerintah daerah. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### Teknik Analisis Data

#### Statistik deskriptif,

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147). Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan dengan menyajikan:

a) *Ranking* perolehan skor dan indeks untuk setiap indikator

Penelitian ini menggunakan skor sebagai alat ukur setiap indeks. Selanjutnya peneliti akan menentukan skor pada setiap indikator dan kemudian akan menjumlahkan skor untuk masing-masing pemerintah daerah untuk mendapatkan total skor IFR untuk masing-masing pemerintah daerah. Sehingga bisa mengetahui perolehan *ranking* skor IFR pada Pemda di Indonesia

b) *Modus* dan *Mean*

*Modus* merupakan teknis penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. *Modus* dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan skor terbanyak yang diperoleh masing-masing Pemda di Indonesia. *Mean* merupakan nilai rata-rata yang bisa mewakili sekumpulan data yang representatif. *Mean* (rata-rata) pada penelitian ini untuk menunjukkan Pemda mana yang memiliki perolehan skor di atas rata-rata dan di bawah rata-rata.

*Cluster analysis*, analisis kluster adalah mengelompokkan objek atas dasar karakteristik yang dimiliki. Analisis kluster mengelompokkan objek berupa entitas, produk, dan responden sehingga masing-masing objek mempunyai kemiripan dengan yang lain dalam suatu kluster. Hasil dari kluster suatu objek harus memiliki internal homogenitas yang tinggi. Dalam analisis kluster ini pengelompokannya terdiri dari pengukuran kemiripan, pembentukan *cluster*, dan penentuan jumlah kluster. Tujuan utama analisis *cluster* adalah menentukan struktur data dengan cara meletakkan observasi yang mirip dalam satu kelompok. Pengelompokan hasil observasi yang mirip ke dalam satu kelompok didasarkan pada korelasi antar objek atau dapat juga dengan mengukur *proximity* pada ruang dua dimensi sehingga jarak antara dua observasi menunjukkan kesamaan. Penelitian ini menggunakan *non hierarchical method*. Metode *non hierarchical* dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan. Metode ini biasa disebut dengan *K-means Cluster*. Dalam penelitian ini menggunakan empat *cluster* untuk mengelompokkan Pemda berdasarkan skor IFR yang diperoleh masing-masing Pemda. Lima kelompok tersebut terdiri dari: sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Banyaknya populasi (*cluster*) tersebut ditampilkan dalam bentuk dendrogram. Skala yang terdapat dalam dendrogram bukan merupakan ukuran dan jarak antar variabel, tetapi hanya merupakan

visualisasi proses *clustering* yang terjadi (Santoso, 2010). Sebelum melakukan analisis *cluster*, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Menurut Jhonatan Sarwono(2015:216), berikut adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis *cluster*: data kuantitatif berskala interval atau rasio, variabel bersifat matrik, tidak ada variabel bebas yang tergantung, ukuran sampel besar atau lebih dari 100

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif

Tabel 4.1  
RATA-RATA INDEKS IFR

Indeks IFR	<i>Content</i>	<i>Timeliness</i>	<i>Technology Used</i>	<i>User support</i>
Rata-rata Indeks IFR	21%	60%	54%	53%

Sumber: Data diolah

*Content*, Indeks konten masih belum begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah di pulau Jawa dan Sumatera. Rata-rata indeks konten yang diperoleh hanya sebesar 21%, hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah di pulau Jawa dan Sumatera terhadap Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Konten sangatlah penting untuk disajikan karena unsur di dalam konten merupakan informasi-informasi keuangan yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan oleh masyarakat. Mengingat konten merupakan unsur terpenting dari pada indeks yang lain maka seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan konten untuk disajikan pada *website* daerahnya masing-masing.

*Timeliness*, Indeks *timeliness* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh *website* Pemda di pulau Jawa dan Sumatera menyajikan berita

dan sebagian besar berita yang disajikan selalu *up to date*, hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menunjukkan indeks *timeliness* yang menunjukkan angka yang baik dengan mendapat nilai diatas 50 persen.

*Technology Used*, Indeks *technology used* juga menunjukkan angka yang bagus, artinya pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. *User support*, Indeks *user support* juga menunjukkan angka diatas 50 persen, ini artinya pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan fitur yang dapat memudahkan pengguna *website*.

*Ranking* perolehan skor dan indeks untuk setiap indikator Penelitian ini menggunakan variabel Internet Financial Reporting. Pengukuran IFR dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Botti (2014). Dimana dalam penelitiannya, IFR diukur dengan empat indeks yaitu: konten, *timeliness*, *technology used*, dan *user support*. Keseluruhan indeks akan dijumlahkan dan akan menghasilkan score untuk masing-masing pemerintah daerah. Dari total tersebut kemudian akan di *ranking* berdasarkan total skor yang diperoleh sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2  
TOP 10 RANKING PEROLEHAN INDEKS

NAMA PEMDA	Indeks IFR	RANKING
Kota Depok	96%	1
Kota Bandung	94%	2
Kota Bogor	93%	3
Kota Pekalongan	92%	4
Kab. Kuningan	89%	5
Kota Sawahlunto	82%	6
Kab. Kebumen	82%	7
Kab. Tegal	80%	8

Kab. Pidie Jaya	77%	9
Kab. Bandung	77%	10

Sumber: Data diolah

Tabel 4.2 menggambarkan bagaimana perolehan sepuluh besar *ranking* Pemda yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. *Ranking* digunakan untuk memberi penilaian terhadap Pemda yang memiliki skore yang tinggi. Semakin tinggi skore IFR yang diperoleh Pemda maka semakin bagus *ranking* yang didapatkan. Pada penelitian ini *ranking* sepuluh teratas di dominasi oleh pemda yang terletak di pulau Jawa. Bahkan untuk *ranking* lima teratas, keseluruhannya merupakan Pemda yang berasal dari pulau Jawa. Pemda yang menduduki lima peringkat teratas adalah Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Pekalongan, Kab Kuningan, dari sini dapat dilihat bahwa jenis pemda Perkotanan lebih dominan dari pada Kabupaten. Dari dua hal tersebut menunjukkan bahwa pemda yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga tingkat peradaban masyarakatnya yang sudah maju akan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakatnya, mengingat masyarakat modern yang tinggal di Kota memiliki kebutuhan informasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat berkembang yang masih tinggal di Kabupaten.

Pemda juga harus mampu melaporkan informasi keuangannya secara lebih lengkap dan rinci untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam melaporkan informasi keuangannya. Mengingat kebutuhan pengawasan dan pelaporan yang lebih besar oleh pemda yang berukuran besar, maka diharapkan pemda dapat mengadopsi metode pelaporan yang paling efektif. Internet dianggap sebagai media yang paling efektif dan efisien bagi pemda dalam pelaksanaan transparansi laporan keuangan. Melalui internet pemda dapat melaporkan informasi keuangannya secara mudah, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga dapat

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelaporan.

#### *Mean dan modus*

Penelitian ini menggunakan *Mean* dan *Modus* untuk menggambarkan rata-rata dan Skore paling banyak yang diperoleh Pemda di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
DESCRIPTIVE STATISTIC IFR PEMDA

IFR		
N	Valid	207
	Missing	0
<i>Mean</i>		33%
Mode		19%
Minimum		5%
Maksimum		95%

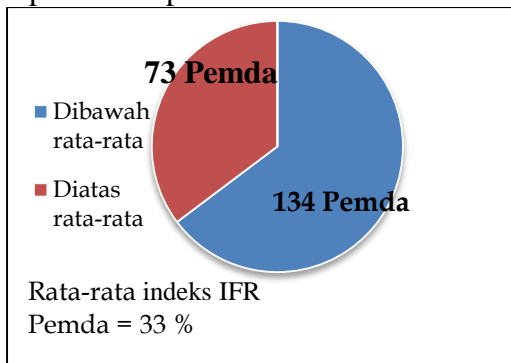
Sumber: Data diolah

Pengungkapan informasi keuangan atau Internet Financial Reporting pada Pemerintah daerah masih dalam bentuk pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* sehingga wajar apabila masih banyak Pemerintah daerah di Indonesia masih belum menerapkan IFR secara sepenuhnya. Namun mengingat pentingnya pengungkapan informasi kepada masyarakat tentunya perkembangan penerapan IFR akan mengalami perkembangan yang positif. IFR dianggap penting karena dengan IFR Pemda mampu menyediakan informasi publik, secara *real-time*, hal ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah daerah. Selain itu penerapan IFR juga mampu mencegah terjadinya praktek penyimpangan dan korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 207 Pemda, dengan nilai rata-rata IFR yang telah diterapkan Pemerintah daerah adalah sebesar 33,14 persen. Untuk mendapatkan gambaran



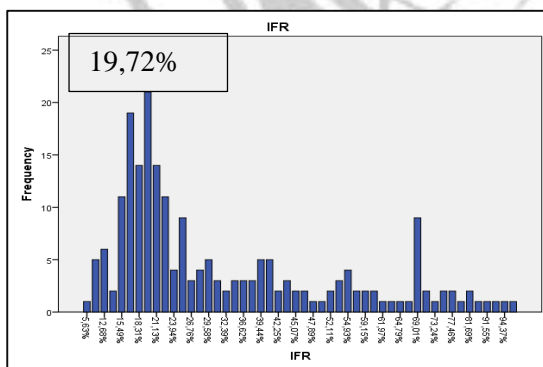
lebih jelas mengenai komposisi Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR diatas rata-rata dengan Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR dibawah rata-rata akan dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Data diolah

Gambar 4.1  
PERBANDINGAN INDEKS IFR  
PEMDA

Gambar 4.1 menunjukkan 73 pemerintah daerah yang memiliki skor IFR diatas rata-rata. Jika di prosentasekan, Pemerintah daerah yang memiliki indeks IFR diatas rata-rata adalah sebanyak 35,27 persen dari total sampel yang ada. Sedangkan Pemerintah daerah yang skor IFR dibawah rata – rata adalah sebanyak 134 Pemda. Jika dinyatakan dalam persentase jumlah pemda yang memiliki indeks IFR dibawah rata – rata adalah sebanyak 64,73 persen dari total sampel yang ada.



Sumber: Data diolah

Gambar 4.2  
INDEKS IFR YANG SERING MUNCUL

Gambar 4.2 menunjukkan *modus* atau skor IFR. Skor IFR yang

paling sering muncul dalam penelitian ini adalah 19,72 persen, ada sebanyak 21 pemda yang memiliki skor 19,72 persen atau jika di prosentasekan jika diprosentasekan ada sebanyak 10,14 persen Pemda yang memiliki skor IFR sebesar 19,72 persen dari total sampel yang ada.

Hasil Penelitian ini juga menunjukkan skor tertinggi dan skor terendah yang diraih Pemda di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pemerintah daerah yang memiliki skor Internet Financial Reporting tertinggi adalah Kota Depok dengan skor sebesar 95,77 persen dan Pemerintah daerah yang memiliki skor Internet Financial Reporting terendah adalah Kabupaten Kaur dengan skor sebesar 5,63 persen.

#### Analisis cluster dengan metode *K-means Cluster*

*K-means* merupakan sekelompok algoritma kluster non hierarki yang bekerja dengan cara membagi observasi-observasi kedalam sejumlah kluster yang ditentukan oleh peneliti dan kemudian mengenakan lagi observasi-observasi secara iteratif sampai tujuan numerik tertentu yang berkaitan dengan perbedaan kluster yang ditentukan (Jhonatan Sarwono, 2015:216). Metode *K-means* dipilih karena data yang digunakan berukuran besar sehingga memiliki kecepatan yang lebih tinggi.

Tabel 4.4

JUMLAH KELOMPOK TIAP KELAS

Number of Cases in Each Cluster	
Cluster	1 13,000
	2 120,000
	3 43,000
	4 31,000
Valid	207,000
Missing	0,000

Sumber: Data diolah

Penelitian ini menggunakan empat kelas untuk mengelompokan perolehan skor IFR Pemda di Pulau

Sumatera dan Jawa. Tabel 4.12 menunjukkan pembagian anggota untuk masing-masing kluster. Kolom *cluster* menunjukkan jumlah kelas, penelitian ini menggunakan empat kelas. Sehingga dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Klaster 1 terdiri dari 13 pemerintah daerah. Klaster 1 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam katagori “sangat tinggi” dalam menyajikan informasi keuangan pada *website* daerahnya.
2. Klaster 2 terdiri dari 120 pemerintah daerah. Klaster 2 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam katagori “sangat rendah” dalam menyajikan informasi keuangan pada *website* daerahnya.
3. Klaster 3 terdiri dari 43 pemerintah daerah. Klaster 3 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam katagori “rendah” dalam menyajikan informasi keuangan pada *website* daerahnya.
4. Klaster 4 terdiri dari 31 pemerintah daerah. Klaster 4 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam katagori “tinggi” dalam menyajikan informasi keuangan pada *website* daerahnya.

Kolom *valid* menunjukkan jumlah sampel pemerintah daerah yang datanya dapat diolah, kolom *valid* menunjukkan angka 207 yang berarti seluruh data dari sampel penelitian dapat diperoleh. Kolom *missing* menunjukkan data yang tidak dapat diolah dalam penelitian ini, kolom *missing* menunjukkan angka 0 yang artinya tidak ada data yang tidak berhasil diolah dalam penelitian ini.

Tabel 4.5  
FINAL CLUSTER

Final Cluster Centers				
	Cluster			
	1	2	3	4
Z-score (IFR)	2,43079	-0,68489	0,18739	1,37190

Sumber: Data diolah

Tabel 4.5 merupakan proses akhir dari *K-means Cluster*. Kolom *Z-score*(IFR) pada final *cluster* centers merupakan angka standarisasi yang dapat menunjukkan skor masing-masing kelas berdasarkan rata-rata skor IFR secara keseluruhan populasi. Jika kolom kelas menunjukan angka *Z-score* (IFR) negatif artinya skor pada kelas tersebut berada dibawah rata-rata skor seluruh populasi. Dan apabila sebaliknya, jika kolom kelas menunjukan angka *Z-score* (IFR) positif artinya skor pada kelas tersebut berada diatas rata-rata skor seluruh populasi .

Tabel 4.5 menunjukan dari ke-empat kelas yang diperoleh, hanya kelas nomor dua yang memperoleh hasil negatif. Artinya, Pemda yang berada dikelompok nomor dua memiliki skor IFR dibawah rata-rata. Sedangkan Pemda yang berada pada kelas satu, tiga, dan empat memiliki skor IFR diatas rata:

Tabel 4.6  
ANOVA TABEL

ANOVA				
	Cluster	Error	F	Sig.
	Mean Square	Mean Square		
Z-score (IFR)	64,320	0,064	1001,196	0,000

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6 digunakan untuk melihat tingkat signifikansi antar *cluster*. Kolom kluster merupakan besaran *between cluster means* dan kolom eror merupakan besaran *within cluster means*. Angka yang berada pada dua kolom ini digunakan untuk menghitung kolom hasil dari kolom F. Nilai dari kolom F hitung dapat diperoleh melalui rumus berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{\text{between means}}{\text{within mean}} = \frac{64,320}{0,064} = 1001,196$$

Hasil perhitungan F hitung menunjukan angka 1000,196 yang artinya semakin tinggi hasil perhitungan F hitung dengan tingkat signifikansi (sig) < 0,05; maka maka semakin besar perbedaan antar

empat kluster yang terbentuk dan memiliki kemiripan antar anggota yang berada dalam kluster yang sama (Jhonatan Sarwono, 2015:216).

Hasil analisis kluster mampu menunjukkan karakteristik tiap kelompok pemerintah daerah. Karakteristik tiap kelompok digambarkan dengan Indeks IFR-nya. Untuk mengetahui karakteristik setiap kluster maka perlu dihitung nilai rata-rata untuk setiap Indeks pada masing-masing kelas. Data rata-rata hasil pengelompokan analisis kluster dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7  
RATA-RATA INDEKS IFR TIAP  
KLUSTER

Kluster	INDEKS AVERAGE				
	<i>content</i>	<i>Timelines</i>	<i>Tech Used</i>	<i>User Support</i>	Total IFR
1	89%	75%	68%	74%	83%
2	3%	53%	49%	45%	19%
3	24%	62%	58%	61%	37%
4	57%	81%	63%	62%	62%

Sumber: Dirangkum oleh penulis

Hasil karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kluster satu merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memiliki skor konten, *technology used* dan *user support* yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Kluster 1 mendapat rata-rata skor konten sebesar 89 persen, rata-rata skor *tech used* sebesar 68 persen, dan skor rata-rata *user support* sebesar 74 persen. Selain itu skor *timeliness* kluster 1 juga merupakan skor tertinggi kedua dengan rata-rata skor sebesar 75 persen. Secara keseluruhan, skor IFR kluster 1 merupakan skor tertinggi jika dibandingkan dengan kluster yang lain. Kluster 1 mendapat rata-rata skor IFR sebesar 83 persen, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada kluster 1 merupakan

Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR yang dapat dikategorikan sangat tinggi.

Kluster dua merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memiliki skor konten, *timeliness*, *technology used* dan *user support* yang paling rendah jika dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Kluster 2 mendapat rata-rata skor konten sebesar 3%, rata-rata skor *timeliness* sebesar 53%, rata-rata skor *tech used* sebesar 49%, dan skor rata-rata *user support* sebesar 45%. Secara keseluruhan, skor IFR kluster 2 merupakan skor paling rendah jika dibandingkan kluster yang lainnya. Kluster 2 mendapat rata-rata skor IFR sebesar 19%, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada kluster 2 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR yang dapat dikategorikan sangat rendah.

Kluster tiga merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memiliki skor konten, *timeliness*, *technology used* dan *user support* yang rendah jika dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Kluster 3 mendapat rata-rata skor konten sebesar 24 persen, rata-rata skor *timeliness* sebesar 62 persen, rata-rata skor *tech used* sebesar 58 persen, dan skor rata-rata *user support* sebesar 61 persen. Secara keseluruhan, skor IFR kluster 3 merupakan skor tertinggi kedua Kluster 3 dengan rata-rata skor IFR sebesar 37 persen. Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada kluster 3 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR yang dapat dikategorikan rendah.

Kluster empat merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memiliki skor konten, *technology used* dan *user support* yang tinggi dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Kluster 4 mendapat rata-rata skor konten sebesar 57 persen, rata-rata skor *tech used* sebesar 63 persen, dan skor rata-rata *user support* sebesar 62 persen. Selain itu skor *timeliness* kluster 4 juga merupakan skor paling tinggi dengan rata-rata skor sebesar

81 persen. Secara keseluruhan, skor IFR kluster 4 merupakan skor tertinggi kedua. Kluster 1 mendapat rata-rata skor IFR sebesar 62 persen, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada kluster 4 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki skor IFR yang dapat dikategorikan tinggi.

Teori legitimasi menyebutkan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Dalam hal ini pemda di posisikan sebagai organisasi yang harus mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini berfungsi agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dari masyarakat. Untuk itu masyarakat haruslah diikutsertakan dalam jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pemda di Indonesia telah memulai untuk melaporkan informasi keuangan melalui *website* yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Walaupun secara rata-rata tingkat pengungkapan informasinya masih belum bisa dikatakan baik dan masih perlu untuk terus ditingkatkan. Dalam situasi seperti ini masyarakat di posisikan sebagai pengawas atas semua kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah. Pengawasan oleh masyarakat dapat melalui informasi keuangan yang telah di sajikan pada *website* pemda.

Peran serta masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangan oleh pemda. Dengan peningkatan pengungkapan informasi maka kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin lebih baik, selain itu dengan kontrol dari masyarakat pula diharapkan agar sistem pemerintahan yang sudah berjalan semakin bersih dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terciptanya kondisi yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah semakin legitimate. Kondisi ini akan menjadikan suatu daerah mampu berkembang secara maksimal. Untuk itu,

perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara salah satunya memberikan akses informasi kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan Pemerintah daerah berdasarkan *content*, *timeliness*, *technology used* dan *web user support*. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan, terdapat 207 pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyajian Informasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemda di Pulau Jawa dan Sumatera masih perlu untuk ditingkatkan. Analisis data menunjukkan tingkat penerapan IFR pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera relatif masih rendah dengan rata-rata perolehan indeks IFR keseluruhan di pulau Jawa dan Sumatera hanya sebesar 33 persen, jika diperinci tiap-tiap indeks akan mendapatkan hasil sebagai berikut: konten mendapat indeks sebesar 21 persen, *timeliness* mendapat indeks sebesar 60 persen, *technology used* mendapat indeks sebesar 54 persen, dan *user support* mendapat indeks sebesar 53 persen. Data ini dapat menggambarkan bagaimana penerapan IFR oleh pemerintah daerah masih perlu untuk ditingkatkan. Terutama pada indeks konten yang nilainya sangat jauh jika dibandingkan indeks yang lain. Mengingat konten merupakan indeks yang sangat penting karena merupakan indeks yang paling utama yang memuat informasi-informasi keuangan yang memiliki banyak kegunaan. Dan sudah seharusnya kalau konten dijadikan prioritas utama untuk segera ditingkatkan penyajiannya baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki skor lebih tinggi



dibandingkan dengan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari *ranking* perolehan skor yang menunjukkan Komponen sepuluh besar masih di dominasi pemerintah daerah yang berasal dari pulau Jawa. Selain itu juga, kluster 1 yang merupakan kelompok Pemerintah daerah yang memperoleh skor IFR tertinggi masih didominasi pemerintah daerah yang berasal dari pulau Jawa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Banyak *website* pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera tidak bisa diakses atau masih dalam masa perbaikan. Sehingga peneliti tidak bisa memperoleh data dari *website* yang tidak bisa diakses tersebut yang menyebabkan berkurangnya sampel penelitian.
2. Terdapat beberapa data *outlier* yang ditemukan dalam penelitian ini, Adanya data outlier ini akan membuat analisis terhadap serangkaian data menjadi bias.
3. Indeks IFR yang digunakan dalam penelitian ini dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama, hal ini disebabkan karena bobot antar indeks belum ditentukan.
4. Penelitian ini belum mendalami praktik penerapan IFR terkait dengan penerapan *social media* yang dijadikan alternatif untuk fitur FAQ dan tidak ditutup kemungkinan akan terjadi kasus lain yang mirip dengan kasus seperti ini.

Sampel penelitian ini belum termasuk Pemda yang mendapat opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan pendapat. Dengan adanya keterbatasan penelitian seperti yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti ingin memberikan saran untuk peneliti Berikutnya sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat menambah jumlah sampel penelitian menjadi seluruh Pemerintah daerah di

Indonesia supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk menggunakan sistem pembobotan pada masing masing indeks IFR yang bisa membedakan bahwa terdapat indeks yang dianggap lebih penting dari yang lainnya.
3. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat mendalami praktik IFR pada satu Pemda tertentu.
4. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk menambah sampel penelitian dengan memasukan Pemda yang mendapat opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan pendapat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, I.G., L.R. Dominguez dan I.M.G. Sanchez. 2010. "Are determining factors of municipal e-government common to a worldwide municipal view? An intra-country comparison." *Government Information Quarterly* 27.
- Amir Makhmud dan Ghaniyyu Mintotik Waliyyani. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, 4(2).
- Anis Chariri dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arai, K., & Barakbah, A. R. (2007). Hierarchical *K-means*: an algorithm for centroids initialization for *K-means*. *Reports of the Faculty of Science and Engineering*, 36(1), 25-31.
- Botti, L., Boubaker, S., Hamrouni, A., & Solonandrasana, B. 2014. "Corporate governance efficiency and internet financial reporting quality". *Review of Accounting and Finance*, 13(1), 43-64.

- Budi Santosa. *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis*. 2007. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Carvalho, Joao Baptista da Costa., Jorge, Susana M, dan Maria Jose Fernandez. 2007. "Conformity and diversity of Accounting Financial Reporting Practise in Portuguese Local Government." *Canadian Journal of Administrative Science*.
- Deegan, Craig. 2000. *Financial Accounting Theory*. Australia NSW: McGrawHill
- Deegan, C., Rankin. M., dan Tobin, J. 2002. "An Examination of the Corporate Social and Environmental *Disclosure* BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory." *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol. 15, No. 3, pp 312-343
- Djoko Suhardjanto dan Sigit Indra Lesmana. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia." *Prestasi* Vol. 6 No. 2. Hal 25-40
- Dody Hapsoro. 2010. "Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Akuntansi dan manajemen* vol. 23 No. 3, Desember 2012. Hal 199-215
- Dowling, John dan J. Pfeffer. 1975. "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior." *The Pacific Sociological Review* Vol. 18 No. 1 hal. 122- 136
- Dwi Martani dan Annisa Lestiani. 2012. "*Disclosure* in local government financial statements : the case of Indonesia." *Gloval review of Accounting and Finance* Vol. 3 No. 1. March 2012. P 67-84.
- Dwi Martani dan Debbi Fitriasari. 2014. "Financial And Performance Transparency On The Local Government *Website* s In Indonesia". *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 60(3).
- Dwi Martani, Dian Nastiti dan Panggah Tri Wicaksono. 2014. "*Disclosure* Of Non-Financial Information About Public Services On The Official *Website* Of Local Governments In Indonesia". *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 66(1).
- Evans, J., Patton, J., 1987. "Signaling and monitoring in public sector accounting". *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130–158.
- Faudziah Hanim Fadzil dan Harryanto Nyoto. 2011." Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. " *World Review of Business research* vol 1 No, 2 pp 51-70.
- García, A. C., & García-García, J. 2010. "Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities." *Local Government Studies*, 36(5), 679-695.
- Imam Ghozali,. 2009. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program". Semarang : UNDIP.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Jonathan Sarwono. 2015. *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*.

- Kirana, R. S. 2009. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (tidak dipublikasikan)
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. "Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities." *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101-121.
- Lizzcharly Purba, Henny Medyawati, Widya Silfianti, dan Budi Hermana. 2013. "Internet Financial Reporting Index Analysis: An Overview from the State Owned Enterprises in Indonesia". *Journal of Economics, Business and Management*. Vol.1 No. 3. Hal 281-284
- Luciana Spica Almilia. 2009. "Determining factors of internet financial reporting in Indonesia." *Accounting & Taxation*, 1(1), 87-99.
- Maya Dewi Trisnawati dan Achmad Komarudin. 2014. Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Jurnal Brawijaya*. Tersedia pada <http://www.Multipara.digma.Lecture.Ub.Ac.Id/files/2014/09/14,9>.
- Moe, T.M. (1984). *The New Economics of Organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Moleong Lexy, 2002. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Remaja Rosdakarya*.
- O'Donovan, 2002. *Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory*, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.15, No.3, pp.344-371.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ratmono Dwi. 2013. "Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah di Internet": Pengujian Teori Institusional dan Keagenan." *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 28-48.
- Rora Puspita & Dwi Martani. 2012. "Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik pemda terhadap tingkat Pengungkapan dan Kualitas informasi dalam website Pemda." *Proceeding SNA*, 15.
- Singgih Santoso. 2010. *Statistik Multivariat*, Jakarta : PT Gramedia.
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). "The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Suchman, L. (1995) *Representations of Work (Special Report)*. *Communications of the ACM*, 38 (9). pp. 33-68
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta

- Syofian Siregar. 2013. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Tahta Alfina., Budi Santosa & Ali Ridho. 2012. Analisa Perbandingan Metode Hierarchical *Clustering*, *K-means* dan Gabungan Keduanya dalam *Cluster Data* (Studi Kasus: Problem Kerja Praktek Teknik Industri ITS). Jurnal Teknik ITS, 1(1), A521-A525.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Verawaty. 2012. "The Accessibility of Public Information of Local Government through E-Government in Indonesia." International Public Sector Conference (IPSC)
- Yacoeb Teuku Hudoyo. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah daerah di Indonesia. Skripsi. FEUNNES." Semarang.
- Yustina Hiola, Rosidi, dan Aji Dedi. 2015. "Political environment in the effect of the regional government financial performance on *disclosure* of financial information on *website*." Journal of Economics, Business, and Accountancy, Vol 19, No 1
- Zimmerman, Jerold L. 1977. "The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives". Journal of Accounting Research. Vol. 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions. Pp. 107-144